



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 20 (Duapuluh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BPH Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 15 September 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 12.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Progres pembangunan infrastruktur gas pipa 2. Progres digitalisasi SPBU sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2020 3. Progres BBM 1 (satu) harga 4. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Kepala BPH Migas B. 29 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 7 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 22 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 22 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 15 September 2020 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH. Selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progres pembangunan infrastruktur gas pipa
 - b. Progres digitalisasi SPBU sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2020
 - c. Progres BBM 1 (satu) harga
 - d. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua rencana pembangunan pipa gas di Indonesia khususnya terkait ketersediaan sumber gas dan calon shippernya.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam rangka percepatan pembangunan pipa gas bumi Cirebon – Semarang sehingga dapat selesai pada Februari 2022.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk mendorong pemenang lelang agar segera memulai pembangunan pipa gas bumi Kalimantan – Jawa 2, terutama pipa transmisi dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari pipa gas bumi Trans Kalimantan dalam *major project* RPJMN 2020 - 2024.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas dalam mengawasi secara intensif pada percepatan pembangunan dan jaminan keberlangsungan *supply* BBM dalam mendukung program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
5. Komisi VII DPR RI melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera melakukan revisi Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 2799 K/ 11/ MEM/ 2012 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012-2025 sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD).
6. Komisi VII DPR RI melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera membuat Peraturan Menteri terkait jumlah dan jenis cadangan BBM Nasional.

7. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi program digitalisasi SPBU secara intensif agar penyelesaiannya dapat sesuai target dan meminimalisir penyelewengan, misalnya dengan pencatatan nomor polisi kendaraan menggunakan CCTV yang terintegrasi secara online dengan BPH Migas.
8. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 22 September 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.20 WIB

KEPALA BPH MIGAS

Jakarta, 15 September 2020

KETUA RAPAT,

DR. M. FANSHURULLAH ASA, MT

H. EDDY SOEPARNO, SH, MH.

A-496